



	<b>SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT</b> Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Padang 25112, Telepon (0751) 31401 – 31402 – 34425 Fax (0751) 34671, www.biroumum.sumbarprov.go.id e- mail: biro_umum@sumbarprov.go.id	Nomor SOP	SOP/76
		Tanggal Pembuatan	04 April 2022
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	Kepala Biro Umum

## SOP PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Undang Undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2008	1. Memahami SOP Permohonan Informasi Publik
2.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Memahami SOP Penyediaan Informasi yang belum tersedia dalam Daftar Informasi Publik (DIP)
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik	3. Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan
		4. Memahami pengujian konsekuensi
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1.	SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP	1. Surat Permohonan Informasi
2.	SOP Pengujian Konsekuensi	2. Surat Tanggapan Atas Keberatan
		3. Komputer dan Kelengkapannya
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan informasi tidak berjalan efektif.	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Atasan PPID	Tim Kuasa Hukum	Tim Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menerima panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan, kemudian menetapkan tim kuasa hukum untuk melakukan penaganan keberatan informasi publik				Panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan	Disesuaikan dengan sidang KIP	Panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan	
2.	Meminta pertimbangan terhadap keberatan informasi publik				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi	
3.	Memberikan pertimbangan keberatan publik				Notulensi atau berita		Surat permohonan, surat jawaban informasi, permohonan keberatan, atas tanggapan panggilan pengujian konsekuensi	
4.	Melakukan upaya penaganan keberatan informal publik				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang,		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang,	